

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung telah menjadi bagian dari demokrasi prosedural di Indonesia. Perubahan Undang – Undang Pemerintahan Daerah dari Undang – Undang No 32 Tahun 2004 membawa perubahan dalam atmosfer politik di tingkat lokal (daerah). Salah satu perubahan tersebut terletak pada desain pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, dari pemilihan oleh DPRD menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat yang diatur dalam pasal 56 hingga 119 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan berubahnya pemilihan kepala daerah dari ditunjuk oleh DPRD menjadi dipilih secara langsung, situasi politik di daerah pun semakin dinamis. Meski kini banyak pihak yang mulai mengkaji efektivitas pilkada secara langsung, namun terdapat beberapa alasan yang membuat proses tersebut perlu dilakukan, antara lain: (1) Meningkatkan legitimasi kepala daerah di hadapan rakyat, (2) Upaya menciptakan kepala daerah yang paham dengan persoalan daerah, (3) Meningkatkan stabilisasi politik di daerah, (4) Meningkatkan akuntabilitas politik kepala daerah kepada rakyat, (5) Penghormatan kedaulatan rakyat di daerah, (6) Bentuk pendewasaan politik elit dan masyarakat di daerah.

Melalui pemilihan secara langsung, kepala daerah akan memiliki legitimasi yang lebih kuat di hadapan rakyatnya di banding ketika ia dipilih oleh DPRD. Dengan demikian, ia akan semakin mantap melakukan perbaikan di daerah karena merasa telah mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat. Pemilihan langsung mansyaratkan pelaksanaan kampanye untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Saat berkampanye kandidat harus melakukan komunikasi untuk mengetahui secara langsung persoalan yang sedang dihadapi daerahnya. Selain itu, ia juga perlu rajin mengkomunikasikan solusi yang ia miliki untuk menyelesaikan persoalan didaerah. Untuk melakukan itu semua, kandidat mau tidak mau harus memahami persoalan di daerah dengan baik. Dengan legitimasi kepala daerah terpilih yang di dapatkan secara langsung dari mayoritas masyarakat, maka secara tidak langsung akan meningkatkan stabilitas politik didaerah. Stabilitas terjadi karena masyarakat mendapatkan pemimpin yang sesuai harapan mereka sehingga baik elit politik maupun kelompok kepentingan perlu menghormati pilihan rakyat dan membantu menjaga stabilitas politik di daerah.

Pemilihan secara langsung adalah bentuk penghargaan sekaligus penghormatan terhadap rakyat di daerah. Pengakuan terhadap suara rakyat sebagai penentu pemimpin yang berhak memimpin sekaligus di percaya oleh masyarakat dapat terwujud melalui pemilihan secara langsung. Dengan mengalami proses pemilihan kepala daerah secara langsung dan adanya kompetisi antar kandidat di daerah, masyarakat dan elit politik

berkesempatan untuk melatih kedewasaan dalam berpolitik. Termasuk ketika calon yang diusung kalah, atau ada pihak lain yang lebih unggul.

Pada tanggal 9 Desember 2015 di langsunakan pemilukada di provinsi kalimantan utara, dalam pemilihan tersebut di tetapkan pasangan peserta sebagai berikut: Jusuf SK dengan Marthin Billa, dengan No urut 1 dan Irianto Lambrie dengan Udin Hianggio, dengan No urut 2. Dari hasil pemilukada tersebut setelah perhitungan suara, pemenangnya di tetapkan pasangan No 2 yaitu Irianto Lambrie dengan Udin Hianggio, namun terjadi protes dari pasangan pesaingnya No 1 dengan tuduhan kecurangan. Konflik terjadi sampai pada tingkat demonstrasi fisik (Spanduk, bakar ban, sampai kepada anarkis) karena pecahnya kaca kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah. Sebagaimana kita ketahui Pembangunan Nasional adalah proses pembangunan yang diselenggarakan secara menyeluruh baik ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berwawasan lingkungan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dapat pula diartikan sebagai apa yang dialami dalam dinamika pembangunan sekarang ini dapat berkelanjutan dan dapat dirasakan pada generasi muda untuk beberapa tahun kedepan. Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya merupakan tujuan utama dan memiliki pengertian sebuah proses pemenuhan segala aspek kehidupan pada saat ini tanpa menimbulkan dampak untuk saat yang akan datang. Dalam praktiknya, pembangunan berkelanjutan sangat sulit karena kompleksitas antara aspek kehidupan dan polarisasi kepentingan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan

kerangka konsep metodologi dan kerangka kerja yang baik untuk mampu menerjemahkan di dalam praktik pelaksanaan.

Setiap perubahan zaman atau bila terjadi krisis selalu muncul usaha – usaha untuk memperbaiki model pembangunan sosial, politik maupun budaya yang berbeda dari paradigma sebelumnya. Usaha pelestarian lingkungan agar tidak terimbas oleh kepentingan ekonomi semata, jauh hari sudah direncanakan harmoni kehidupan ini tanpa harus merusak keaslian dan ekosistem alam. Untuk mencapai Pembangunan Nasional dalam kondisi keterbatasan sumber – sumber pembiayaan lokal, maka visi dan misi pelaksana pemerintah atau perangkat dari pusat sampai Desa perlu melakukan pembangunan yang menyeluruh tanpa ada rasa was – was maupun ketakutan oleh lembaga atau badan pengawas selama dijalankan dengan benar. Untuk itu perlu dipilih atau ditentukan pemimpin yang benar – benar siap. Siap mental maupun spiritual artinya dia mempunyai akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, dan sifat yang transparan. Masing – masing maknanya menurut penulis adalah sebagai berikut: Akuntabilitas yaitu sejauh mana jajaran pemegang amanah (pemimpin) dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan pertanggung jawaban kepada pemberi amanah, yang memiliki hak dan kewajiban untuk dimintai pertanggung jawaban tersebut. Untuk proporsionalitas adalah seorang pemimpin dalam melaksanakan kegiatan harus sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan seorang pemimpin harus profesional adalah dia harus mampu melaksanakan pekerjaan sesuai

dengan kompetensi yang dimiliki dan dilaksanakan dalam koridor standart atau kode etik yang telah ditetapkan oleh institusi yang terkait. Jika sesuai penulis yakin pemimpin tersebut akan dapat mendatangkan manfaat lebih besar apabila tata kelola pemerintahannya diimplementasikan sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Namun masing – sering penulis jumpai, bahwa masih sangat banyak penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Mereka mayoritas belum mengukirkan kesadaran dalam diri, hati dan pikirannya untuk siap melayani masyarakat. Kondisi yang ada pelayanan publik di negeri ini masih memakai prosedur yang terbeli- belit, akses sulit, biaya yang tidak transparan, waktu penyelesaian tidak jelas, dan banyaknya praktik pungutan liar serta suap yang merajalela.

Dalam praktik pemerintahan yang baik pelayanan publik perizinan dan non perizinan merupakan wujud pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Dalam hal ini birokrat pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka adalah pelayan masyarakat sehingga masyarakat dalam melakukan urusannya merasa dilayani dan dipermudah. Masyarakat harus diberi kesempatan dan peluang dalam mendapatkan informasi yang benar dari pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus transparan dalam menginformasikan syarat, prosedur, biaya dan waktu penyelesaian setiap jenis perizinan dan non perizinan yang akan diajukan oleh masyarakatnya. Namun Indonesia ini

defisit manusia jujur. Bagaimana tidak. Realitas sosial kita menunjukkan perilaku budaya korupsi telah melahirkan budaya baru, yaitu: culas, main belakang, dan suka berbohong. Karena itulah walaupun umur Indonesia 70 tahun. Negeri ini masih saja mengalami defisit manusia jujur. Jenis budaya seperti itu, bahkan kini telah ditiru dan dijadikan ikon dari sistem sosial di Republik Indonesia ini. Para guru, peneliti, aktivis, LSM, intelektual, bahkan mungkin para tokoh agama. Padahal mereka adalah pilar utama kejujuran dan moral. Agamawan dan aktivis LSM kita pun tidak kalah unik. Mereka hanya bersuara lantang terhadap fenomena kejanggalan sosial di tengah masyarakat, ketika menguntungkan satu kelompok tertentu dan tidak membahayakan aktivitas sosialnya. Ini berarti ada suatu kepentingan yang disembunyikan. Para agamawan, aktivis LSM, hari – hari seolah tangan bernesraan dan bergandeng tangan dengan elite politik lokal dalam pilpres, pilgub, pilkada, pilbup, pilkades. Sangat tidak aneh bila akhir – akhir ini di antara mereka banyak yang menjadi pemuka-pemuka partai Politik yang berakhir dengan kekerdilan oleh rasa dan karsa (Iskandar, 2016).

Manusia Indonesia adalah manusia yang hobi berbohong dan menggadaikan keyakinan yang sebenarnya. Itulah sebabnya mengapa budaya makan uang (korupsi), money politik menjadi trend dalam ciri sosial di Republik ini. Banyak manusia atau sebuah kalangan organisasi, lembaga, partai politik mengecam korupsi, mengecam money politik dan sejenisnya, namun semuanya itu hanyalah kepura – puraan mereka.

Mereka bersolek seolah – olah mereka membenci hal – hal yang berbau menyengsarakan masyarakat, akan tetapi semua hal itu hanya di lakukan di forum – forum terhormat yang ramai di lihat orang, yang di rekam oleh wartawan, yang di saksikan oleh khalayak ramai. Namun ketika sendirian, sepi dan sekaligus ada kesempatan apapun bisa mereka lakukan. Misalnya korupsi, bukan uangnya saja yang di korup tapi bisa jadi meja, semen, dan sarana prasarana yang ada merka makan juga. Dalam Orasi Budayanya berjudul: *Manusia Indonesia “Sebuah Pertanggung Jawaban; katanya; mental manusia Indonesia cenderung hipokrisi yang ciri utamanya suka berpura – pura, lain dimuka lain pula dibelakang. Lain kata lain pula di hati”* (Mochtar Lubis, 1977).

Lemahnya sanksi moral di tengah masyarakat. Masyarakat di hadapkan kepada buah simalakama. Karena banyak kita jumpai orang – orang yang melakukan itu realitanya adalah orang yang menjadi donatur utama atau donatur tetap di sebuah tempat ibadah, organisasi – organisasi sosial keagamaan, panti asuhan, dan lain sebagainya. Memang orang – orang seperti itu amat sangat lihai dengan trik – triknya dalam menarik simpatik dari masyarakat. Dalam konteks budaya sebenarnya kita munafik dan penuh pertimbangan moral dalam memberi sanksi sosial. Seandainya masyarakat kita masyarakat yang tidak munafik, sudah tentu tidak akan menerima uluran tangan dan bantuan dari orang – orang yang jelas perolehan uang atau bantuannya itu tidak baik. Bahkan seharusnya masyarakat mengisolasinya dari pergaulan sosial. Sanksi sosial yang

nampak sederhana ini di pastikan akan mampu mengeliminir meminimalisir perilaku tidak patu itu. Kenyataan dari keadaan sebelum dan sesudah pesta demokrasi, pasti kita menjumpai manusia yang mondar mandir menuju simpatisan maupun jagonya masing – masing. Sewaktu pra pemelihan para calon maupun Tim sukses merebut simpatisan, mendatangi kelompok – kelompok bahkan rumah ke rumah pun di layani demi bertambahnya dukungan. Itu terjadi tidak semata – mata datang untuk sillaturahmi namun biasanya dengan janji bila nanti terpilih akan di kabulkan apa yang di minta pemilih. Janji pengerasan jalan sekaligus janji mengaspalnya, janji membuatkan atau merehab jembatan, janji memberikan sembako secara rutin tiap bula, janji penggratisan biaya pendidikan anak – anak sekolah, janji pengangkatan seorang tenaga honorer menjadi pegawai negeri, janji memberikan uang sekian rupiah per kepala, dan masih banyak lagi janji – janji yang di lontarkan para calon demi menarik simpati masyarakat kepadanya.

Dalam hitungan detik, mereka bisa merubah sikap. Yang biasanya sombong, angkuh, suka menyendiri, di karenakan butuh dukungan, mereka akan berbuat sopan, manis dala bertutur sapa maupun bersikap, masyarakat, bahkan dengan cara apapun meraka akan lakukan demi terlihat beribawa dan bersahaja di hadapan para calon pemilihnya. Beda lagi setelah pemilihan. Akan berbalik 180 derajat. Meskipun keadaanya akan tetap sama. Para Tim Sukses dan simpatisan datang dan pergi ke rumah calon. Biasanya minta ganti atas jerih payah mereka atau nagih janji

sesuai dengan yang di ucapkan pada saat pra pemilihan. Setidaknya tidak jauh berbeda keadaannya, seperti itulah yang terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015. Di warung – warung kopi, dan beberapa tempat orang nongkrong, termasuk pada waktu masyarakat istirahat dari pekerjaannya seputar itu adalah menjadi topik pembahasan yang menarik. Sebenarnya semua itu mereka lakukan sambil sarapan pagi, sambil makan siang atau sekedar merokok. Sebenarnya hal itu sangat merugikan diri sendiri. Namun entahlah semua orang selalu terjebak untuk tertarik menjadikan hal itu sebagai topik pembicaraan (Yahdian, 2016).

Objek studi penelitian ini adalah mengenai hal – hal yang mempengaruhi terjadinya sentimen kedaerah dalam proses pemilihan Kepala Daerah. Dimana pemilihan Kepala Daerah saat ini rentan atas adanya demonstrasi ataupun konflik. Dengan dasar asumsi itulah saya ingin membuktikan secara langsung adanya faktor penolakan dalam proses pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Utara melalui kesaksian – kesaksian warga masyarakat/pemilih yang kemudian saya kemas dalam sebuah judul:

“Faktor Penyebab Aksi Penolakan pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat di rumuskan dalam rumusan masalah adalah Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penolakan dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Utara?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya penolakan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana usaha mencegah sentimen kedaerahan antara penduduk pribumi dengan penduduk pendatang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Utara.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dari pelaksanaan penelitian sekaligus penyusunan laporan berupa skripsi ini penulis sangat besar berharap bisa memberikan manfaat bagi pribadi peniliti/penulis, yang mudah – mudahan saja juga bisa di rasakan manfaatnya bagi beberapa pihak, di antaranya:

1. Bagi Kalangan Akademik

Sebagai perguruan tinggi yang di siplin ilmunya di bidang politik, sosial, dan keagamaan (Islam), kiranya dengan adanya peneliti ini dapat menjadikan laporan atas penelitian ini sebagai referensi dan hasanah ilmu pengetahuan mengenai fenomena – fenomena politik di Provinsi Kalimantan Utara. Sekaligus untuk membandingkan antara data dan realita maupun antara teori dan praktiknya, yang akhirnya bisa merumuskan keduanya sehingga di temukan kemasam pendidikan politik yang lebih baik dan terpadu sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan zaman.

2. Bagi Masyarakat

a. Bagi Kepala Daerah

Manfaat penelitian sekaligus laporan (skripsi) ini bagi Kepala Daerah adalah sebagai tambahan pengetahuan mengetahui susana politik di tempat beliau bertugas/memerintah, sehingga bila ada kelemahan dan kekurangan maupun penyimpangan yang terjadi di masyarakatnya, Kepala Daerah beserta aparatnya bisa segera melakukan tindakan preventif dan antisipatif.

b. Bagi Masyarakat Secara Umum

Dengan adanya penelitian ini semoga di jadikan masyarakat sebagai penyadaran akan arti penting mempunyai prinsip dalam menjalani kehidupan sehingga tidak mudah goya terhadap konflik dan iming – iming uang atau apapun dan bagaimanapun bentuknya pada saat di laksanakan pemilihan umum Kepala Daerah.

E. Kerangka Teori

A. Konflik Secara Umum

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configure* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Dalam proses demokrasi (elektoral), konflik merupakan sebuah keniscayaan karena setiap individu atau kelompok sosial memiliki kepentingan, pemahaman, dan nilai yang berbeda - beda. Konflik relatif mudah hadir dari basis sosial yang lebih kompleks, dibanding hanya sekedar suatu kompetisi dalam proses demokrasi (Ramlan Surbakti, 1992: 149).

Menurut Karl Marx (1818 – 1883), mengemukakan bahwa:

“Salah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem sosial yang terdiri dari bagian - bagian dan komponen - komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda - beda dimana komponen yang satu berusaha untuk

menaklukan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya masing - masing. Terdapat tiga andaian penting mengenai teori konflik yaitu konsep dialektik, determinisme dan aktivisme sosial. Konsep dialektik bermaksud evolusi bukan merupakan proses utama kepada perubahan sosial tetapi sebab utama yang menghasilkan perubahan sosial ialah konflik. Determinisme ekonomi pula bermaksud asas kepada perubahan sosial adalah ditentukan oleh persaingan - persaingan ekonomi. Manakala aktivisme sosial bermaksud tugas utama analisis sosial adalah kritikan”.

Selanjutnya Menurut Gibson, et al (1997: 437), mengemukakan bahwa:

“ hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing – masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri – sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain”.

B. Konflik Politik

Menurut Hidayat (2002: 124), mengemukakan konflik politik dalam pilkada, yaitu :

“Pada dasarnya politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Suatu konflik biasanya berawal dari kontroversi – kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa politik, dimana kontroversi tersebut diawali dengan hal – hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan berproses menjadi suatu konflik”.

Selanjutnya menurut Rauf (2001: 19), mengemukakan bahwa:

“Konflik politik merupakan salah satu bentuk konflik sosial, dimana keduanya memiliki ciri – ciri yang mirip, hanya yang membedakan konflik sosial dan politik adalah kata politik yang membawa konotasi tertentu bagi istilah konflik politik, yakni mempunyai keterkaitan dengan negara/pemerintah, para pejabat politik/pemerintah, dan kebijakan”.

Sedangkan menurut Surbakti (1992: 151), mengemukakan bahwa:

“Konflik politik merupakan kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang keputusan politik, kebijakan publik dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa beserta

segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan – hubungan diantara partisipan politik”.

C. Faktor Konflik Dalam Pilkada

Setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) selalu dijumpai yang namanya konflik. Menurut Lele, Gabriel (2010: 38), faktor-faktor penyebab konflik dalam pilkada antara lain:

1. *Kepentingan setiap elite lokal, elite nasional, pengusaha dan kepentingan kekuatan - kekuatan politik lain di daerah yang sedang bertarung memperebutkan kekuasaan.*
2. *Kesalahan penafsiran terhadap implementasi undang - undang yang mengatur persoalan pilkada.*
3. *Belum bakunya infrastruktur pemilihan pejabat publik yang sering kali kontroversial.*
4. *Lemahnya institusionalisasi demokrasi di tingkat lokal (KPUD) yang menjadi faktor dominan timbulnya konflik antar kekuatan politik. Akibatnya, aturan main berdemokrasi sering berubah, berbeda - beda, dan tidak ditaati karena bergantung pada persepsi pusat yang menentukan hasil akhir proses politik di tingkat lokal.*
5. *Diversifikasi sumber konflik.*
6. *Dendam kelompok dan dendam sejarah, yang umumnya sangat peka untuk diprovokasi.*
7. *Pola kompetisi yang bergerak tidak sehat melalui intervensi kekuasaan, politik uang, anarkis dan arogansi.*
8. *Sistem manajemen termasuk payung hukum yang tidak berwibawa, tidak berfungsi dan tidak dihormati.*
9. *Rapuhnya simbol perekat dan pemersatu yang mencakup nasionalisme, etnisisme, etika dan budaya politik yang luhur.*
10. *Sikap dan perilaku aktor politik yang tidak terkendali, menerabas dan terjerumus ke deviant politik.*

D. Ciri – ciri Konflik Politik

Menurut Ted Robert Gurr (1980) menyebutkan paling tidak memiliki empat ciri konflik politik, yaitu sebagai berikut:

1. *Ada dua atau lebih pihak yang terlibat*
2. *Masing-masing pihak terlibat dalam tindakan yang saling memusuhi.*
3. *Masing-masing pihak menggunakan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan lawan-lawannya.*
4. *Interaksi pertentangan bersifat terbuka, sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh pengamat independen.*

E. Penyebab Konflik Politik

Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Paul Conn, tentang Penyebab konflik Politik (Ramlan Surbakti, 1992: 152), pada dasarnya disebabkan oleh dua hal:

1. *Kemajemukan Horizontal*
2. *Kemajemukan Vertikal*
 - a. *Kemajemukan horizontal ialah struktur masyarakat yang majemuk kultural, seperti, suku bangsa, daerah, agama, dan ras; dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama, dan cendekiawan; dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti desa dan kota. Kemajemukan horizontal dapat menimbulkan konflik karena masing - masing unsur cultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain. Dalam masyarakat yang demikian itu, apabila belum ada suatu konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik politik karena benturan budaya akan menimbulkan perang saudara ataupun gerakan separatisme. Kemajemukan horisontal dapat menimbulkan konflik karena masing-masing kelompok yang berdasarkan pekerjaan dan profesi serta tempat tinggal tersebut memiliki kepentingan berbeda bahkan saling bertentangan.*
 - b. *Kemajemukan vertikal ialah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan dapat menimbulkan konflik, sebab sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki atau hanya*

memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut. Jadi, Distribusi kekuasaan, pengetahuan, dan kekuasaan yang pincang merupakan penyebab utama timbulnya konflik politik. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan perbedaan kepentingan karena kemajemukan horizontal dan vertikal tidak dengan sendirinya menimbulkan konflik politik. Hal ini disebabkan adanya fakta, terdapat sejumlah masyarakat yang menerima perbedaan - perbedaan tersebut. Perbedaan - perbedaan masyarakat ini baru menimbulkan konflik apabila sekelompok tersebut memperebutkan sumber yang sama, seperti kekuasaan, kekayaan, kesempatan, dan kehormatan. Konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan. Dalam rumusan lain dapat dikemukakan konflik terjadi jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil atau manakala pihak berperilaku menyentuh "titik kemarahan" pihak lain. Dengan kata lain, perbedaan kepentingan karena kemajemukan vertikal dan horizontal merupakan kondisi yang harus ada (necessary condition) bagi timbulnya konflik, tetapi perbedaan kepentingan itu bukan kondisi yang memadai (sufficient condition) untuk menimbulkan konflik).

Menurut Simon Fisher (2001: 7-8), mengemukakan bahwa:

- 1. Teori hubungan masyarakat, bahwa konflik politik di sebabkan polarisasi, ketidakpercayaan (distrust) maupun permusuhan antar kelompok yang berada ditengah – tengah masyarakat kita.*
- 2. Teori negosiasi prinsip, bahwa konflik disebabkan oleh posisi – posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak – pihak yang terlibat didalamnya.*
- 3. Teori kebutuhan manusia, bahwa konflik politik yang muncul ditengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut.*

4. *Teori identitas, bahwa konflik lebih disebabkan identitas yang terancam atau berakar dan hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan.*
5. *Teori transformasi konflik politik, bahwa konflik politik disebabkan oleh hadirnya masalah – masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.*

F. Tipe – tipe Konflik Politik

Max Webber mendeskripsikan konflik menjadi dua tipe

(sohidin, 2004: 12-13), yaitu:

1. *Konflik politik. Konflik ini muncul tidak hanya didasarkan pada kepentingan kekuasaan dan ekonomi, tetapi banyak faktor lain dibalik itu semua, diantaranya factor ideologi. Demikian pula konflik ini tidak hanya terjadi pada organisasi politik, tetapi juga terjadi pada organisasi keagamaan. Konflik dalam gagasan dan cita-cita. Konflik ini terjadi karena setiap individu atau kelompok.*
2. *Ada naluri ingin mendominasi dalam pandangan dunia, baik yang berkaitan dengan doktrin agama, nilai budaya, filsafat, maupun gaya hidup kultural. Konflik politik dikelompokkan menjadi dua tipe, yang mana meliputi konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif adalah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud ialah lembaga - lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum - forum terbuka lainnya. Tuntutan akan perubahan yang di ajukan oleh sejumlah kelompok masyarakat melalui lembaga - lembaga itu merupakan contoh konflik positif. Sebaliknya, konflik negatif ialah konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara - cara non konstitusional, seperti kudeta, separatisme, terorisme dan revolusi.*

G. Pengelolaan Konflik Politik

Menurut Fisher (2001: 6-7), mengemukakan sebagai berikut :

“Dalam konteks demokrasi ada perubahan pemahaman mengenai konflik politik, dimana konflik tidak lagi dipahami sebagai aktifitas yang negatif, buruk, dan merusak, tetapi sebaliknya konflik merupakan aktifitas yang positif dan dinamis. Hal ini berlanjut pada perubahan konsepsi penyelesaian konflik menjadi pengelolaan konflik. Ini sebuah perbedaan sangat penting. Pertama, penyelesaian konflik menunjuk pada penghentian atau penghilangan suatu konflik, dengan demikian implikasinya adalah konflik merupakan sesuatu yang negatif, yang buisa diselesaikan, diakhiri, bahkan dihapuskan. Kedua, berbeda dengan penyelesaian konflik, pengelolaan konflik lebih memberi pemahaman bahwa konflik bisa positif, bisa juga kreatif”.

H. Tujuan Konflik Politik

Secara umum tujuan konflik politik ada dua, yakni mendapatkan dan atau mempertahankan sumber - sumber. Tujuan konflik politik untuk mendapatkan sumber - sumber merupakan ciri manusia yang hidup bermasyarakat karena manusia memerlukan sumber - sumber tertentu yang bersifat materil - jasmaniah maupun spiritual - rohanih untuk dapat hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat. Yang ingin diperoleh manusia meliputi hal - hal yang sesuai dengan kehendak bebas dan kepentingannya. Kemudian kecendrungan hidup manusia juga akan selalu mempertahankan dan memelihara sumber yang dimilikinya dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber - sumber tersebut. Yang ingin dipertahankan bukan hanya

harga diri, keselamatan hidup dan keluarga, tetapi juga wilayah/daerah tempat tinggal, kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki (Ramlan Surbakti, 1992: 155).

Dengan asumsi tersebut, maka tujuan konflik politik juga bisa dikategorikan sebagai berikut :

- 1. Pihak - pihak yang terlibat dalam konflik politik mempunyai tujuan yang sama, yakni sama - sama berupaya mendapatkan.*
- 2. Disatu pihak hendak mendapatkan, sedangkan dipihak lain berupaya keras mempertahankan apa yang dimiliki.*

I. Resolusi Konflik Politik

Pengaturan/Resolusi konflik politik menurut Ralf Dahrendorf, ia mengatakan bahwa pengaturan konflik politik yang sangat efektif bergantung pada tiga faktor (Ramlan Surbakti, 1992: 156) :

- 1. Kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi diantara mereka (adanya pengakuan atas kepentingan yang diperjuangkan oleh pihak lain).*
- 2. Kepentingan - kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisir secara rapi, tidak bercerai berai dan terkotak - kotak sehingga masing - masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain.*
- 3. Kedua belah pihak menyepakati aturan main (rules of the game) yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi diantara mereka. Ketika ketiga isyarat ini dipenuhi maka berbagai bentuk pengaturan konflik dapat dibuat dan dilaksanakan.*

F. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

Supaya permasalahan yang di bahas tidak menyimpang dari sasaran yang di maksud, sehingga pembahasan sesuai dengan garis – garis yang lebih di tentukan, maka bagian ini dahulu penulis sampaikan sebagai berikut :

- Konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.
- Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan umum yang dilakukan di daerah dengan penyelenggara komisi pemilihan umum daerah diikuti oleh beberapa pasangan calon baik yang di usung oleh partai politik maupun secara independen.

“Faktor Penyebab Aksi Penolakan Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015”

2.	Pilkada	<ul style="list-style-type: none"> - Memilih pemilih cerdas - Memilih pemilih benar - Memilih pemilih simpatik 	<ul style="list-style-type: none"> - Kreatif - Tidak salah - Menarik hati 	<ul style="list-style-type: none"> - W8 - W9 - W10
----	---------	---	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan ada penelitian deskriptif kualitatif, maksudnya penulis hanya menggambarkan keadaan di lapangan supaya terlihat kualifikasinya dan fenomenanya dengan demikian penulis akan menguraikan secara deduksi lalu kemudian mengambil kesimpulan secara induksi (Surachman, 1980: 33).

2. Jenis Data

Dalam mengidentifikasi dalam pelaksanaan penelitian ini penulis mencari data berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer/Data Khusus

Data Primer adalah data yang diterima oleh peneliti dari pihak pertama yang sifatnya sangat subjektif karena diberikan secara langsung berupa pendapat pribadi kepada peneliti oleh para responden/informan.

b. Data Sekunder/Data umum

Data sekunder adalah data yang sifatnya objektif karena dikumpulkan dari pihak ketiga yang bentuknya sudah diolah, biasanya oleh peneliti terdahulu, jurnal ilmiah, atau monografi setempat.

3. Teknik/Cara Pengumpulan Data

Dengan menggunakan alat keperluan data di atas peneliti mengumpulkan data dengan teknik/cara :

a. Pengamatan (Observation)

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan tanpa

direkayasa. Observasi yang akan dilakukan peneliti berada di lingkungan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan mengenai konsep penelitian (atau yang terkait dengannya) terhadap individu manusia yang menjadi unit analisa penelitian ataupun terhadap individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa penelitian (Rahmawati, 2010: 33).

Wawancara dilakukan untuk mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam, untuk mengetahui hal – hal yang lebih mendalam tentang aksi penolakan dalam situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Wawancara di buat berdasarkan instrumen yang penulis cantumkan pada tabel definisi konseptual dan operasional.

Dalam konteks ini peneliti mewawancarai sebagian masyarakat untuk menunjang data tentang faktor dan sentimen kedaerahan masyarakat pada 6 responden yaitu :

- Suryanata Al Islami, Ketua KPU
- Chairulliza, Komisioner KPU
- Lili suryani, Anggota KPU
- Hasmiah, Pendukung Calon
- Anna Dinata, Pendukung Calon
- Riduansyah, Pendukung Calon

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, peneliti edit kemudian di klasifikasikan dan kemudian penulis analisa. Penulis menggunakan deskriptif kualitatif non statistik. Menurut (Hadari Nawawi 1987: 62) mengemukakan bahwa “Penelitian deskriptif dapat di artikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain – lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang nampak. Selanjutnya (Hadari Nawawi 1987: 63) menjelaskan bahwa “Penelitian deskriptif dapat di wujudkan juga sebagai usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala yang di temukan, mengadakan klasifikasi gejala yang standar menetapkan hubungan antar gejala – gejala yang di temukan”.

Data yang di hasilkan adalah kualitatif deskriptif, maka yaitu berupa gambaran – gambaran dengan menggunakan metode analisi sebagai berikut ini :

- a. Kualitatif Deduktif yaitu : Kenyataan – kenyataan yang bersifat umum di ambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Kualitatif Induktif yaitu : Kenyataan – kenyataan yang bersifat khusus di tarik kesimpulan yang bersifat umum.

Selanjutnya data – data tersebut di analisis dengan membandingkan apa yang di peroleh dalam teori dengan apa yang di peroleh di dalam praktiknya.